PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

**PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 27 TAHUN 2008**

TENTANG

**IZIN TEMPAT USAHA DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum dalam dunia usaha perlu adanya pengaturan sistem tempat berusaha yang diatur dalam bentuk Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan pungutan retribusi atasnya.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4548)
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No : 4680)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU**

Dan

WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN TEMPAT USAHA DAN
PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha Lainnya.
7. Retribusi Izin Tempat Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penerbitan Surat Izin Tempat Usaha oleh Pemerintah Daerah.
9. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi.
10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat untuk melakukan pembayaran atas pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah.
14. Penyidikan Tingkat Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat jelas tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Izin Tempat Usaha dan Pungutan Retribusi atasnya, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin tempat usaha digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV PROSEDUR PENGURUSAN DAN PERSYARATAN IZIN

Pasal 6

Prosedur Pengurusan Izin :

- a. Yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota Kotamobagu cq. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Kotamobagu; dan
- b. Setelah permohonan dan syarat-syaratnya diteliti, Surat Izin Tempat Usaha (SITU) diproses dan jika ternyata persyaratan yang diperlukan tidak lengkap, kepada yang bersangkutan diminta untuk melengkapinya.

Pasal 7

Persyaratan izin untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

1. Tarif digolongkan berdasarkan luas jenis tempat usaha.
2. Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut

a. Perusahaan Golongan I terdiri atas jenis usaha yaitu :

1. Swalayan Super Market.....	Rp	250.000,-
2. Toko Elektronik dan Sejenisnya	Rp	140.000,-
3. Toko Alat Kendaraan Bermotor	Rp	175.000,-
4. Toko Pakaian/Tekstil	Rp	125.000,-
5. Toko Bahan Bangunan.....	Rp	125.000,-
6. Toko Sepatu dan Sejenisnya.....	Rp	100.000,-
7. Toko Kacamata.....	Rp.	100.000,-
8. Toko Buku dan Alat Olah Raga.....	Rp	110.000,-
9. Toko Pakan Ternak dan sejenisnya.....	Rp	100.000,-
10. Toko Jual Beli Hasil Bumi.....	Rp.	125.000,-
11. Toko Emas.....	Rp.	115.000,-
12. Toko Obat.....	Rp.	115.000,-
13. Apotik.....	Rp.	125.000,-
14. Kios.....	Rp.	50.000,-
15. Warung.....	Rp.	30.000,-
16. Gudang:		
a. Luas s/d 100 M2.....	Rp.	50.000,-
b. Luas 111 s/d 150 M2.....	Rp.	75.000,-
c. Luas 151 dan seterusnya.....	Rp	100.000

17. Usaha lainnya yang tidak terdaftar pada poin di atas akan dikenakan sesuai besar atau kecil usaha yaitu:.....Rp.50.000 s/d 1.000.000,

b. Perusahaan Golongan II :

1. Penyalur/ Show Room Kendaraan Roda 4(Empat).....	Rp.	150.000,-
2. Penyalur/ Show Room Kendaraan Roda 2(Dua).....	Rp.	125.000,-
3. Rumah Makan.....	Rp.	100.000,-
4. Restoran.....	Rp.	150.000,-
5. Bar/ Diskotik.....	Rp.	200.000,-
6. Tempat Foto Copy		
a. Menggunakan 1-2 unit mesin.....	Rp.	80.000,-
b. Menggunakan 3-5 unit mesin.....	Rp.	100.000,-
c. Menggunakan 6 sampai seterusnya unit mesin.....	Rp.	125.000,-
7. Rental mobil.....	Rp.	150.000,-
8. Warung Telekomunikasi (Wartel) dan sejenisnya.....	Rp.	75.000,-
9. Tempat permainan anak-anak Game zone.....	Rp.	200.000,-
10. TV kabel.....	Rp.	100.000,-
11. Export / Import		
a. Dalam Negeri (antar pulau).....	Rp.	150.000,-
b. Luar Negeri.....	Rp.	200.000,-
12. Tukang jahit : a) Menyediakan kain.....	Rp.	120.000,-
b) Tidak.....	Rp.	50.000,-

c. Perusahaan Golongan III

1. Penggajian (Sawmil).....	Rp.	200.000,-
2. Bengkel Kendaraan roda 4 (empat).....	Rp.	125.000,-
3. Bengkel Kendaraan roda 2 (dua).....	Rp.	100.000,-
4. Pembuatan Kendaraan roda 3 (tiga) (Bentor).....	Rp.	100.000,-
5. Pembuatan Genteng, Tegel, Batu bata dan sejenisnya.....	Rp.	100.000,-
6. Tempat pencucian kendaraan bermotor.....	Rp.	60.000,-
7. Tempat servis alat-alat elektronik dan sejenisnya.....	Rp.	60.000,-
8. Studio Foto dan cuci cetak foto.....	Rp.	100.000,-
9. Penggilingan padi.....	Rp.	100.000,-
10. Penggilingan Batu emas / tromol.....	Rp.	125.000,-
11. Tong pengelolaan limbah emas.....	Rp.	200.000,-
12. SPBU.....	Rp.	250.000,-
13. Pangkalan Minyak tanah.....	Rp.	75.000,-
14. Penyalur BBM.....	Rp.	30.000,-
15. Pembuatan perabot Rumah Tangga (membel).....	Rp.	100.000,-

d. Perusahaan Golongan IV

1. Bank Swasta.....	Rp.	175.000,-
2. Asuransi swasta.....	Rp.	100.000,-
3. Praktik dokter		
a. Dokter umum.....	Rp.	125.000,-
b. Dokter spesialis.....	Rp.	150.000,-
4. Tempat Praktek Dokter Bersama.....	Rp.	250.000,-
5. Laboratorium Swasta.....	Rp.	150.000,-
6. Klinik swasta.....	Rp.	150.000,-
7. Klinik bersalin swasta.....	Rp.	150.000,-
8. Rumah sakit swasta.....	Rp.	170.000,-
9. Rumah sakit bersalin swasta.....	Rp.	170.000,-
10. Akuntan, Pengacara, Konsultan, Notaris.....	Rp.	175.000,-
11. Hotel.....	Rp.	200.000,-
12. Penginapan.....	Rp.	150.000,-
13. Rumah Bola (Bilyard).....	Rp.	60.000,-